

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PENERBITAN STNK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM *QUICK WINS* DI KANTOR BERSAMA SISTEM
ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU
ATAP (SAMSAT) KABUPATEN MELAWI**

Oleh

RIDHO HIDAYAT, S.IK. A.2021131089

ABSTRACT

This thesis discuss the effectiveness of publishing services in the framework of the implementation of the program stnk quick wins in the office with a unified administrative system of the roof (Units) Melawi. From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion, that: The services provided to the people who assessed from the dimensions of service quality in the process of issuing vehicle registration service of vehicles R2 / R4 in Samsat Office Melawi been good .. It is proven that category both received the highest total assessment of all categories of service. In the service process in the issuance of vehicle registration, the Quick Wins program also experience barriers in terms of ministry. The obstacles come from external and internal SAMSAT. Ie internal aspects of human nature that is responsible for a third unit in the ministry and their kekurangdisiplinan care workers, while the external aspects of the persistence of the society at the time registration was incomplete and there are still people who do not understand when the registration form has been informed in writing SAMSAT regarding the conditions that must be completed in the management of vehicle registration and the registration form. Recommendations from the study of this thesis is SAMSAT Melawi need to improve further its service on the dimensions of empathy on indicators of friendliness and courtesy in providing services to the public so that people can feel the hope of better services can tercapai. Demi improve the quality of service to the community so much better then SAMSAT should take action against care workers who lack discipline. In addition to improving the speed of service in order to reduce the ignorance of some people in the complete file registration requirements and fill out the registration form, it is expected that service personnel should be more clearly inform the public either directly or indirectly so that the public can better know again fill out the registration form as well as on registration requirements.

Keywords: Effectiveness vehicle registration Publishing Services in the Context of the Implementation of the Quick Wins Program

ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah efektivitas pelayanan penerbitan stnk dalam rangka pelaksanaan program *quick wins* di kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) Kabupaten Melawi. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai dari dimensi-dimensi kualitas pelayanan dalam pelayanan proses penerbitan STNK kendaraan R2/R4 di Kantor Samsat Melawi telah baik.. Hal tersebut dibuktikan bahwa kategori baik mendapat total penilaian pelayanan tertinggi dari semua kategori. Dalam proses

pelayanan dalam penerbitan STNK, program *Quick Wins* juga mengalami adanya hambatan dalam hal pelayanannya. Hambatan tersebut berasal dari eksternal maupun internal SAMSAT. Aspek internal yaitu sifat SDM dari ketiga unit yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan adanya kekurangdisiplinan petugas pelayanan, sementara itu dari aspek eksternal masih adanya masyarakat pada waktu pendaftaran berkasnya belum lengkap dan masih ada masyarakat yang belum mengerti mengisi formulir pendaftaran padahal pihak SAMSAT telah menginformasikannya secara tertulis mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengurusan STNK dan mengenai pengisian formulir pendaftaran. Rekomendasi dari Penelitian tesis ini adalah Samsat Melawi perlu meningkatkan lagi pelayanannya pada dimensi *empathy* pada indikator keramahan serta kesopanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar harapan masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik lagi dapat tercapai. Demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi maka SAMSAT harus menindak petugas pelayanan yang kurang disiplin. Selain itu guna meningkatkan kecepatan pelayanan demi mengurangi ketidaktahuan sebagian masyarakat dalam melengkapi berkas persyaratan pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran, maka diharapkan petugas pelayanan harus lebih jelas lagi memberikan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung agar masyarakat bisa lebih tahu lagi mengisi formulir pendaftaran serta mengenai persyaratan pendaftarannya.

Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan Penerbitan Stnk Dalam Rangka Pelaksanaan Program *Quick Wins*

Latar Belakang

Reformasi Birokrasi Polri bertujuan terciptanya Good Governance dan Clean Government yaitu adanya perubahan yang mendasar pada pelayanan di sektor publik dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, supremasi hukum dan keadilan, ketanggapan (responsiveness), serta efektifitas dan efisiensi. Dengan demikian dapat dihasilkan dimensi baru dalam pelayanan publik yang terkait dengan perilaku birokrasi, sumber daya, koordinasi serta efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran program/ kegiatan birokrasi.

Tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya dihadapkan pada permasalahan internal berupa keterbatasan sumber daya personel, kesejahteraan yang masih rendah, keterbatasan materiil, peralatan, sarana dan prasarana serta anggaran maupun tantangan eksternal sebagai akibat pengaruh lingkungan strategi global, regional, nasional dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan Polri secara cepat, tepat dan akuntabel. Oleh sebab itu Polri harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut dengan mereformasi bidang instrumental, struktural dan kultural, namun hasilnya dirasakan Polres Melawi masih belum optimal.

Program *Quick Wins* adalah suatu program unggulan Kapolri dalam rangka meraih keberhasilan segera (QTAP: *Quick, Transparent, Accountabel, and Professional*) dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kemitraan terhadap publik/masyarakat kepada instansi Polri, dalam waktu yang cepat. *Quick Wins* merupakan program akselerasi dan transformasi Polri dalam rangka membenahi Polri sesuai dengan tugas pokok, peran, dan fungsinya. Polri menetapkan Grand Strategi Polri 2005-2025 yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu 2005-2010 *trust building*, 2010-2015 *partnership building*, dan 2015-2025 *strive for excellence*. Program akselerasi ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi Polri yang diharapkan memberikan perubahan dalam aspek kultural.

Quick Wins juga menekankan pada program fungsi lalu lintas pada tahun 2010, yaitu transparansi pelayanan SIM, STNK, BPKB (SSB), mewujudkan akses transparansi online, mewujudkan iptek kepolisian online, perangkat informasi teknologi kepolisian (perintek), mewujudkan hukum kepolisian online, implementasi strategis polmas terhadap masyarakat/komunitas, ketanggapsegeraan (*quick response*), serta penanganan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

Sasaran dalam pelaksanaan program *Quick Wins* adalah masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pelaksana yang melaksanakan program *Quick Wins* adalah aparat kepolisian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program *Quick Wins* tersebut merupakan langkah Polri dalam mewujudkan perubahan demi pencapaian keberhasilan dan kesuksesan dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satu pencapaian keberhasilan segera tersebut tertuang dalam 1 (satu) program *Quick Wins* yaitu dalam bidang pelayanan lalu lintas bentuknya adalah pelayanan SIM, STNK, dan BPKB.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut Polri melaksanakan program percepatan melalui program *Quick Wins*. Program *Quick Wins* yang digulirkan sejalan dengan Grand Strategi Polri telah ditetapkan sebagai tujuan yang ingin dicapai adalah Membangun Kerjasama (kemitraan) yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas Polri (Partnership Building) serta dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri, karena Program *Quick Wins* merupakan produk utama tugas pokok Polri yang mempunyai daya ungkit yang kuat (*key leverage*) serta hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dalam waktu segera.

Polres Melawi yang merupakan satuan kewilayahan jajaran Polda Kalbar sebagai pelaksana program-program Polri berkewajiban untuk melaksanakan sepenuhnya terhadap program-program Polri khususnya yang berkaitan dengan program Reformasi Birokrasi Polri yang telah dijabarkan oleh Polda Kalbar. Tujuan analisis data kesederhanaan dalam pelayanan penerbitan STNK kendaraan bermotor R2/R4 adalah untuk melihat kesederhanaan prosedur pelayanan agar masyarakat mudah memahaminya dan bisa melaksanakannya.

Sebelum adanya program *Quick Wins*, pelayanan penerbitan STNK kendaraan bermotor R2/R4 di Polres Melawi sangat sulit dirasakan masyarakat dan bersifat berbelit-belit, tetapi setelah adanya program *Quick Wins*, prosedur/tata cara pelayanan penerbitan STNK kendaraan bermotor R2/R4 sudah sangat mudah dilakukan masyarakat dan tidak berbelit-belit lagi karena masyarakat telah mudah melakukan registrasi di setiap loket karena adanya gedung pelayanan yang satu atap tersebut. Jadi masyarakat mudah mengakses administrasinya dengan cepat. Hal ini penting karena kemudahan akses masyarakat ketika melakukan penerbitan STNK sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat banyak.

Ada beberapa instansi yang bertanggung jawab dalam melakukan proses penerbitan STNK kendaraan bermotor R2/R4, diantaranya yaitu Kepolisian, DISPENDA, PT. JASA RAHARJA (Persero). Mengenai informasi ini, bisa dilihat dari pakaian pegawai yang melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing.

Ketiga instansi tersebut ditempatkan ke satu ruangan di setiap masing-masing loket pelayanan sehingga dapat mempermudah pelayanan.

Kepolisian Resort Melawi bertanggung jawab kepada masyarakat dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, DISPENDA bertanggung jawab dalam hal pemungutan kendaraan pajak bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan PT. JASA RAHARJA (Persero) bertanggung jawab dalam hal pelayanan pemungutan SWDKLLJ. Akan tetapi berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui instansi apa saja yang bertanggung jawab dalam penerbitan STNK kendaraan bermotor R2/R4 tersebut.

Terkait sosialisasi waktu yang diberikan pihak SAMSAT mengenai kapan terbitnya, pihak SAMSAT mengatakan bahwa memang tidak ada sosialisasi mengenai waktu kapan terbitnya STNK kendaraan R2 ataupun R4 tersebut. Hal ini menyebabkan mengalami ketidakjelasan waktu menunggu. Terkait kejelasan waktu penyelesaian waktu masyarakat jelas tidak mengetahuinya karena pegawai tidak memberikan informasi yang jelas mengenai penyelesaian penerbitan STNK kendaraan R2 ataupun R4.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan SAMSAT dalam memberikan informasi yang jelas terkait dengan waktu penyelesaian penerbitan STNK jenis kendaraan R2 ataupun R4 kurang jelas. Padahal ini sangat perlu karena keterbukaan kepada masyarakat mengenai kejelasan waktu penerbitan sangat penting bagi masyarakat guna memudahkan masyarakat untuk mengetahui berapa lama berkas dan STNK tersebut bisa diambil ke SAMSAT. Jika masyarakat belum diberikan informasi mengenai waktu yang telah ditentukan maka masyarakat tidak akan tahu berapa lama masyarakat menunggu STNKnya terbit. Maka dari itu pihak SAMSAT harus lebih jelas lagi memberikan informasi mengenai jadwal waktu kepada masyarakat dengan memberikan informasi secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu perlu dibuat spanduk ataupun papan informasi mengenai standar waktu penerbitan dan memberikan informasi langsung kepada masyarakat ketika masyarakat selesai mendaftarkan berkasnya.

Berdasarkan analisis data kesederhanaan pelayanan penerbitan STNK kendaraan bermotor R2/R4 maka temuan penelitiannya kesederhanaan pelayanan penerbitan STNK kendaraan bermotor R2/R4 belum efektif. Masyarakat belum merasakan kepuasan akan kesederhanaan pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan.

Permasalahan

Bagaimana Upaya Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Penerbitan STNK

Dalam Rangka Pelaksanaan Program Quick Wins WIN Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Melawi kedepan?

Pembahasan

Reformasi yang sudah dicapai oleh Polri berbagai penataan pelayanan sudah dilakukan jajaran Direktorat Lalu Lintas Polri sekarang ini, namun masih perlu lebih dipacu lagi dengan berbagai paradigma baru agar aparat kepolisian yang profesional dapat segera direalisasikan. Masyarakat perlu ikut mendorong agar Direktorat Lalu Lintas Polri terus menerus berbenah diri secara maksimal. Sehingga ke depan, jajaran Direktorat Polri mampu menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, penegak hukum, menciptakan keamanan, dan ketertiban serta kelancaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dan segenap jajaran Direktorat Lalu Lintas Polri harus konsisten menjalankan fungsi utamanya.

Fungsi utama Polri adalah memelihara keteraturan dan setiap saat siap untuk memberikan pelayanan pada warga masyarakat yang memerlukan, dan menegakkan hukum atau mengatur moralitas publik. Untuk mendukung fungsi utamanya ini, proses reformasi Birokrasi pada Direktorat Lalu Lintas Polri sebagai bagian dari reformasi Polri harus diarahkan benar-benar menuju Polisi sipil dalam masyarakat demokratis. Yaitu dari Polisi pelayanan selama ini reaktif dan konvensional menuju Polisi kemitraan dan proaktif serta lebih mengutamakan pencegahan.

Quick Wins merupakan program-program unggulan akselerasi mencapai sasaran Grand Strategi Polri 2011-2015 Trust Building untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri. Quick Wins juga merupakan Transformasi birokrasi pelayanan yang modern dan profesional dalam mewujudkan dan memelihara Kamseltibcar Lantas. Adapun program-program unggulan Quick Wins bidang lantas adalah Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKB yang merupakan bagian dari pelayanan publik termasuk untuk pelayanan keamanan dan keselamatan baik kendaraan maupun manusia untuk kepentingan Kamtibmas maupun Kemanusiaan dalam rangka menjaga memelihara Kamseltibcar Lantas. Oleh karena itu pelayanan SIM, STNK dan BPKB harus dilaksanakan secara cepat, tepat, akurat dan transparan sehingga masyarakat semakin percaya dan mencintai Polisi. Untuk itu Ditlantas Polri dan jajaran melakukan Inovasi untuk meningkatkan, memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat seperti Samsat Keliling, SIM keliling, SIM dan STNK corner / gerai, Samsat drive thru dan On line sistem SIM dan On Line Sistem antara BPKB dan STNK bertujuan mempercepat pelayanan dan akurasi data.

Peranan instansi pemerintahan seperti Kantor Bersama SAMSAT dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal sangat mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan Kantor Bersama SAMSAT merupakan satu-satunya instansi pemerintahan yang berwenang dalam pengurusan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan realita tentang pelayanan publik pada Kantor Bersama SAMSAT itulah maka diperlukan upaya konkrit dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam hal ini, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan internal yang dihadapi oleh Kantor Bersama SAMSAT Melawi dalam melaksanakan Pelayanan Penerbitan STNK Dalam Rangka Pelaksanaan Program Quick Wins WIN antara lain :

1. Pengadaan suatu sarana dan prasarana tentunya berkaitan erat dengan anggaran biaya yang diperlukan. Apabila dengan minimnya anggaran yang diberikan maka tentunya juga menjadi hal yang sulit bagi Kantor Bersama SAMSAT Melawi untuk dapat membangun suatu sarana dan prasarana teknologi informasi sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sehingga dalam hal ini Kantor Bersama SAMSAT Melawi mencoba membuat suatu terobosan baru untuk mengatasi kelemahan sistem yang sangat rentan terhadap hembusan angin kencang atau cuaca buruk yakni dengan mengantisipasi hal tersebut dengan memasang sebuah alat sensor cuaca yang dapat mengantisipasi apabila cuaca buruk tiba maka sistem layanan dapat dihentikan sementara sehingga meminimalisir kemungkinan mati mendadak yang apabila hal tersebut terjadi dapat mengakibatkan Penerbitan STNK Dalam Rangka Pelaksanaan Program Quick Wins WIN menjadi kacau. Tetapi hal ini lantas tidak memungkinkan untuk mengupayakan kembali pengadaan fasilitas teknologi informasi yang lebih baik sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat karena pengadaan fasilitas merupakan hal yang mutlak diperlukan.
2. Pengkoordinasian suatu Kantor Bersama SAMSAT yang merupakan gabungan dari 3 instansi yakni Polri, Dipenda dan PT Jasa Raharja (Persero) jelas memerlukan pengkoordinasian yang sinergis. Hal ini dikarenakan setiap instansi tersebut memiliki Unit Pelaksana Teknis sendiri sehingga mereka mempunyai wewenang dalam bidang masing-masing. Hal ini mengakibatkan silih seringnya tercampurnya urusan satu dengan urusan lainnya. Hal ini disebabkan tidak adanya suatu unit khusus yang membawahi 3 instansi yang ada di dalam Kantor Bersama SAMSAT tersebut sehingga para petugas dan aparat yang bekerja di Kantor Bersama SAMSAT dapat

dikatakan menjadi kurang terkoordinasi dengan baik. Upaya yang dimaksud adalah setiap usaha yang dilakukan aparat yang ada di dalam Kantor Bersama SAMSAT Melawi itu sendiri yaitu dengan meningkatkan kinerja para petugas agar tidak lamban seperti yang selama ini terjadi serta menindak tegas para calo-calo yang ada dalam Kantor Bersama SAMSAT itu sendiri. Kalaupun perlu adalah dengan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka walaupun praktek percaloan tersebut dilakukan oleh aparat dan petugas itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan seperti itu.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan eksternal yaitu Salah satu ukuran utama atau indikator bagaimana layanan Program Quick Wins WIN berjalan efektif atau tidak adalah mengenai partisipasi masyarakat atau wajib pajak dalam menggunakan fasilitas ini. Layanan Program merupakan layanan unggulan Kantor Bersama SAMSAT Melawi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam penerbitan STNK dalam pelaksanaan program Quick Wins WIN Di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Melawi. Sehingga layanan ini diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat . Salah satu upaya Kantor Bersama SAMSAT Melawi dalam mengatasi bagaimana masyarakat yang cenderung memakai jasa calo dari pada mengurus sendiri adalah melakukan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat pada umumnya dan pada kelompok elemen masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur pengurusan yang sesuai dengan ketentuan serta kelengkapan.

Kesimpulan

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai dari dimensi-dimensi kualitas pelayanan dalam pelayanan proses penerbitan STNK kendaraan R2/R4 di Kantor Samsat Melawi telah baik.. Hal tersebut dibuktikan bahwa kategori baik mendapat total penilaian pelayanan tertinggi dari semua kategori. Dalam proses pelayanan dalam penerbitan STNK, program *Quick Wins* juga mengalami adanya hambatan dalam hal pelayanannya. Hambatan tersebut berasal dari eksternal maupun internal SAMSAT. Aspek internal yaitu sifat SDM dari ketiga unit yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan adanya kurang disiplin petugas pelayanan, sementara itu dari aspek eksternal masih adanya masyarakat pada waktu pendaftaran berkasnya belum lengkap dan masih ada masyarakat yang belum mengerti mengisi formulir pendaftaran padahal pihak SAMSAT telah menginformasikannya secara tertulis mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengurusan STNK dan mengenai pengisian formulir pendaftaran.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1987. Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press.
- Achmad Tjahyono & Muh. Taufik Husein, 2002. Perpajakan di Indonesia; Yogyakarta : YKPM.
- Amir Santoso, 1992. Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Jakarta : Gramedia.
- Amrah Muslimin, 1982. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung : Alumni.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arifin P Soeria Atmaja, 2009. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Disertasi, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Connolly, Sara and Alistair Munro, 1999. *Economics of The Public Sector*, New York: Prentice Hall.
- Davey, K.J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, diterjemahkan oleh Amanullah, Jakarta: UI Press.
- Dye., Thomas R. 1978. *Understanding public policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Easton, David. 1953. *The Political System*, New York: Knopf.
- Erly Suandi, 2000. Hukum Pajak, Jakarta : Salemba Empat.
- Eti Rochaety, dkk. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Bumi Akara, Jakarta, 2010.
- Friedrick, Carl J. Friedrich, 1963. *Man and His Government*, New York: Mc Graw Hill.
- George C. Edwards III, Ira Sharkansky, 1978. *The Policy Predicament*, San Fransisco: W.H. Freeman and Company,.
- Guritno Mangkoesoebroto, 1998. *Ekonomi Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Ibnu Syamsi, 1993. Diktat Kuliah Kebijaksanaan Publik dan Pengambilan Keputusan, Yogyakarta : Fisipol UGM.
- Irawan Soejito, 1981. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta : Bina Aksara.
- Jenkins, W.I. 1978. *Public Analysis*, Oxford: Martin Robertson.

- Jhingan, MI. 1994. *Macroeconomics Theory, second edition*, India: Vrina.
- J. Kaloh, 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Jakarta : Rineka Cipta.
- J.S. Badudu, 1994. Sutan Mohammad Zen, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Krishna D. 2003. Darumurti, Uumbu Rauta, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Laswell, Harold D., Abraham Kaplan, 1970. *Power and Society*, New Haven: Yale University Press.
- Miyasto, 1991. Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai. Studi Mengenai Dampak terhadap Harga, Penerimaan dan Struktur. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muqodim, 1999. Perpajakan Buku Satu, Yogyakarta : UII Press.
- R. Kaho, 1995. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rochmat Soemitro, 2004. Asas dan Dasar Perpajakan 2. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.